



---

## **From KNIP Building to Sarinah Mall Building: Societeit Concordia in Malang City 1900-1970**

**Rizka Cahyaning Arifin Putri\***

[rizkaarifin@mail.unnes.ac.id](mailto:rizkaarifin@mail.unnes.ac.id)

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

**Abstract** *This article discusses the transformation of the function of the Societeit Concordia building in Malang City in 1900-1970. This building was originally the center of social activities of the European elite during the Dutch colonial period which reflected social segregation and a symbol of colonial power in urban planning. After Indonesian independence, the building shifted functions to house the Malang Regional Central Indonesian National Committee (KNIP) in the late 1940s, marking the appropriation of colonial space by national power. Entering the 1970s, the building began to be redirected to a new function as an economic space, which later developed into Sarinah Mall as part of the city's modernization and economic nationalization. The writing of this article uses a historical method that emphasizes the credibility of sources. The results show that the transformation of Societeit Concordia is a representation of the political, social and economic dynamics in postcolonial Malang City. The building not only changed its function physically, but also experienced changes in meaning in the collective memory of the city community. These findings emphasize the importance of adaptive conservation of historic buildings to keep them relevant to the times without losing their historical value.*

**Keywords:** *Concordia, Malang, colonial, KNIP, Sarinah Mall*

**Abstrak** Artikel ini membahas tentang transformasi fungsi bangunan Societeit Concordia di Kota Malang tahun 1900-1970. Bangunan ini awalnya menjadi pusat aktivitas sosial kaum elit Eropa pada masa kolonial Belanda yang mencerminkan segregasi sosial dan simbol kekuasaan kolonial dalam tata ruang kota. Setelah kemerdekaan Indonesia, gedung ini mengalami pergeseran fungsi menjadi tempat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Daerah Malang pada akhir 1940-an, menandai apropriasi ruang kolonial oleh kekuasaan nasional. Memasuki dekade 1970-an, gedung tersebut mulai diarahkan untuk fungsi baru sebagai ruang ekonomi, yang kemudian berkembang menjadi Mall Sarinah sebagai bagian dari modernisasi kota dan nasionalisasi ekonomi. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang sangat menekankan pada kredibilitas sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi Societeit Concordia merupakan representasi dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Kota Malang pascakolonial. Bangunan tersebut tidak hanya beralih fungsi secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan makna dalam memori kolektif masyarakat kota. Temuan ini menegaskan pentingnya konservasi adaptif terhadap bangunan bersejarah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai historisnya.

**Kata Kunci :** Societeit Concordia, Malang, kolonial, KNIP, Mall Sarinah

### **Pendahuluan (Introduction)**

Kota Malang dengan Kerajaan Singasari merupakan satu kesatuan sejarah yang tidak bisa lepas. Kerajaan tersebut cukup maju pada zamannya walaupun letaknya di pedalaman. Hal ini juga menjadi daya tarik ketika kekuasaan kolonial Belanda datang, mereka membangun Kota Malang sebagai pusat pemerintahan dengan status karesidenan. Karena kondisi geografis yang mendukung, kota ini juga dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Pemerintah kolonial Belanda menyusun Kota Malang sebagai tempat hunian untuk melepas penat setelah mengurus perkebunan yang terletak di sekitar kota (Basundoro, 2009).

Kota Malang menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal. Mulai dari keindahan alamnya hingga keunikan bangunan peninggalan kolonial menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Pada masa pemerintahan kolonial, Kota Malang mendapatkan julukan *Switzerland Van Java* dikarenakan pesona alam yang menakjubkan dan tata kota yang teratur. Salah satu aspek pentingnya adalah keberadaan bangunan bergaya arsitektur Eropa, terutama kawasan Kayutangan dan Ijen. Bangunan-bangunan ini didominasi oleh gaya Art Deco dan *Indische Empire* yang menjadi simbol modernitas kolonial (Choirunnisak & Afiyanto, 2022). Beberapa bangunan dengan arsitektur Eropa masih dapat ditemui di beberapa titik, meskipun banyak yang mengalami perubahan fungsi maupun bentuk.

Perubahan fungsi maupun bentuk terjadi di Gedung Societeit Concordia. Gedung ini pada awal abad ke-20 menjadi tempat perkumpulan kaum elit Eropa untuk menonton konser music, pertunjukan balet, dan perjamuan makan. Di era pendudukan Jepang tidak ada sumber yang menyebut pasti gedung ini digunakan untuk apa, namun saat itu dapat diketahui Bersama bahwa Jepang saat itu sedang fokus dengan politik perang dan menstabilkan ekonominya untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Pada masa yang sama di beberapa kota gedung bekas pemerintahan kolonial Belanda digunakan Jepang sebagai markas militer ataupun penjara tahanan.

Pada masa awal kemerdekaan gedung Societeit Concordia digunakan sebagai tempat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Daerah Malang. Hal ini menandai adanya pergeseran fungsi dari simbol kekuasaan kolonial menjadi pusat aktivitas politik nasional. Pergantian fungsi ini merefleksikan proses apropriasi ruang kolonial oleh negara pascakolonial.

Memasuki era Orde Baru, fungsi gedung Societeit Concordia mengalami perubahan. Konteks ekonomi dan modernisasi kota menjadi alasan utama penyebab perubahan tersebut. Gedung direnovasi dan dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan bernama Mall Sarinah. Bangunan ini kemudian dibuka untuk umum sebagai bagian dari kebijakan nasionalisasi ekonomi serta perluasan fungsi ruang publik urban. Penulisan artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai transformasi baik dari fungsi dan bentuk dari perubahan Gedung KNIP menjadi Mall Sarinah.

### **Metode (*Methods*)**

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, penulis menggunakan beberapa artikel ilmiah yang relevan. Artikel tersebut juga ditulis oleh beberapa akademisi dengan fokus sejarah kota Malang. Sangat sulit menemukan banyak tulisan yang fokus ke Gedung Societeit Concordia di Malang. Hal ini dikarenakan fungsi dan bentuk bangunan tersebut sering berubah dan tidak ada penanda yang berdampak sehingga sedikit yang tertarik membahasnya.

Setelah dilakukan kritik dengan seksama diperoleh hasil bahwa artikel yang ditemukan kredibel dan relevan untuk digunakan sebagai sumber penulisan ini. Beberapa

artikel berlatarbelakang multidisiplin ilmu seperti arsitektur dan teknik sipil dikarenakan pembahasan mengenai struktur bangunan juga sedikit dibahas dalam penulisan ini.

Setelah beberapa artikel dibaca, maka dilakukan interpretasi dengan tulisan sezaman, peristiwa yang terjadi di tahun itu, hingga perkembangan kondisi kota kolonial sejenis. Harapannya tulisan historiografi ini dapat menjelaskan bagaimana kondisi saat itu hingga Gedung Soceteit Concordia berubah menjadi beberapa bentuk dan fungsi seperti Gedung KNIP dan Mall Sarinah.

## **Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)**

### **Kota Malang sebagai Kota Kolonial**

Melalui Undang-Undang Agraria dan Gula (1870), Pemerintah Kolonial Belanda membuka akses tanah serta mendorong investasi swasta dalam perkebunan. Keputusan ini mendorong industrialisasi komoditas strategis seperti gula dan kopi. Keberhasilan kebijakan ini menarik imigran asal Eropa dan Asia untuk datang ke Malang. Kota Malang kemudian berkembang dengan dinamika transformasi ekonomi yang masif. Hal ini dikarenakan dibangunnya Pabrik Gula Kebon Agung (1905), Pabrik Gula Kribet (1906), Pabrik Rokok NV Faroka dan Pabrik Rokok Bentoel di era 1930-an. Adanya industrialisasi ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tulang punggung perekonomian lokal (Saffanah, 2018).

Pemerintah Hindia Belanda kemudian memperkenalkan *wijkenstelsel* untuk memisahkan kelompok sosial berdasarkan ras dan etnis. Kebijakan ini menekankan pemisahan ruang hunian dan administrasi ekonomi antara kulit putih, Timur Asing dan pribumi (Hosniyah, 2016). Dapat diartikan pemerintahan kolonial secara formal mengendalikan struktur sosial ruang.

Pada awal abad ke-20, Malang resmi menjadi *gemeente* (kotapraja) pada 1 April 1914 berdasarkan *Statsblad* no. 297 tahun 1914 (Yuliati, 2012). Status baru yang dimiliki Kota Malang dapat menjadi acuan untuk pembangunan kota modern dan pengelolaan keuangan secara mandiri (Saffanah, 2018). Status ini menandai dimulainya transformasi Malang menjadi kota kolonial modern yang dirancang melalui rencana tata ruang (*Bouwplan*) secara sistematis. Dengan status barunya, kota ini memiliki otonomi untuk menata rumah tangganya sendiri. Kota Malang kemudian berkembang dengan dibangunnya sarana kota. Kemajuan terus dicapai namun tidak lebih hanya memperlancar kepntingan bangsa Eropa.

Perencanaan Kota Malang kemudian dipengaruhi oleh prinsip *Garden City* yang diprakarsai oleh Thomas Karsten. Karsten juga merancang dan mendesain tata Kota Semarang (Basundoro, 2012). Karsten mengenalkan penataan ruang kota yang membedakan kawasan pemukiman Eropa, kawasan pribumi dan kawasan publik (Rondonuwu & Wahjutami, 2024). Proses pembangunan lebih terarah, terencana, dan terkontrol karena menggunakan ahli tata kota. Struktur kota ini kemudian mencerminkan segregasi sosial dan kekuasaan kolonial dalam urban.

Selain merencanakan pembangunan tata kota, Karsten juga memikirkan hal lain yaitu pembangunan jalan dan tersedianya ruang terbuka yang cukup luas. Pengembangan

jaringan jalan disesuaikan dengan lalu lintas kendaraan. Jalan tersebut dianggap penting karena menghubungkan beberapa fasilitas kota sehingga semua terintegrasi dengan baik. Ruang terbuka yang cukup luas seperti lapangan maupun taman juga perlu untuk dibangun. Sarana ini sangat penting sebagai jantung kota dan tempat merileksasikan syaraf bagi warga kota. Fasilitas terbuka dibangun seperti Stadion Gajayana yang menyatu dengan kompleks pemukiman elit Ijen Boulevard (Basundoro, 2009).

Beberapa tahun pertama setelah peresmian kota, peta fungsi kota diperjelas melalui zonasi dan sistem penganggaran yang terstruktur. Hal ini menjadi fondasi Pembangunan publik pada dekade selanjutnya. Perencanaan kota berlangsung melalui *Bouwplan 1-VIII* mulai dari merancang boulevard, ring road, dan pemisahan fungsi (residensial, komersial, administratif). Melalui rancangan ini dapat dilihat bahwa gagasan urban kolonial sangat estetis dan fungsional (Choirunnisak & Afianto, 2022). Tahun 1929-1935 Thomas Karsten kemudian ditunjuk sebagai eksekutor untuk membuat tatanan kota modern saat itu.

Pada periode tersebut, Kota Malang ditata secara modern yang kemudian memisahkan Kawasan administratif, residensial Eropa, dan pemukiman pribumi. Malang pada masa *Bouwplan 1-VIII* terbagi zonasi sesuai etnis, serta nilai ekonomi di tiap zona. Pemisahan wilayah tempat tinggal tersebut didesain oleh pemerintah untuk mempermudah kontrol atas mereka serta meminimalisir konflik (Basundoro, 2012).

Guna mendukung mobilitas dan akses komoditas perkebunan ke pelabuhan, dibangunlah rel kereta dan tram. Infrastruktur ini juga memfasilitasi perjalanan elit kolonial antara kota dan villa di luar pusat kota. Pemerintah kolonial juga membangun klinik dan fasilitas Kesehatan di Kawasan Eropa dan pekerja perkebunan, namun fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh kaum pribumi. Hal ini menciptakan ketimpangan sosial dalam akses Kesehatan. Ini bukan hanya fisik ruang, namun juga merupakan perwujudan kebijakan sosial yang memisahkan kelas dan ras. Ketimpangan ini menjadi warisan struktur kota.

Malang juga menjadi kota destinasi orang Eropa dengan julukan “kota sejuk” yang memiliki fasilitas modern sehingga menarik sebagai tempat rekreasi. Hal ini mendorong banyak dibangunnya villa, taman, dan layanan sosial. Hal ini juga membuat arsitektur kota berkembang dengan gaya “Indies” terlihat dari bangunan bank, kantor pos, dan hotel yang menggabungkan gaya estetika Eropa dan lokal. Karakter yang tertanam dalam asitektur bangunan tersebut mencerminkan ciri khas arsitektur kolonial era 1914-1940.

Kota Malang menjelma menjadi Kota Kolonial yang banyak menyimpan memori kolonial. Hal ini tercermin melalui bangunan benteng dan barak, perkantoran, rumah-rumah, gedung societeit, dan rumah ibadah. Gedung-gedung tersebut biasanya dibangun dalam satu kawasan untuk memudahkan mobilisasi setiap kegiatannya. Gedung Societeit Concordia di Kota Malang terletak di pusat kawasan penring Alun-Alun Malang yang merupakan simbol identitas kota saat itu (Makkelo, 2017).

Secara keseluruhan Kota Malang bertransformasi menjadi kota modern di awal abad ke-20. Hal ini terlihat dari adanya zona etnis, infrastruktur yang selektif, serta bentuk

arsitektur bangunan yang khas menegaskan pembentukan ruang sosial Eropa. Kawasan elit dibangun untuk menjaga eksklusivitas dan dominasi. Struktur ini membentuk warisan yang sangat kompleks dan masih bisa dilacak secara ruang hingga saat ini.

### **Pendirian dan Fungsi Societeit Concordia Tahun 1900-1942**

Bangunan kolonial di Malang tidak hanya menggambarkan estetika Eropa, namun juga memperlihatkan proses adaptasi terhadap iklim tropis Indonesia. Hal ini terlihat dari penggunaan elemen-elemen jendela lebar, teras luas, dan atap tinggi yang memfasilitasi sirkulasi udara dan pencahayaan alami (Handinoto & Soehargo, 1996). Selain fungsi teknis, bangunan tersebut, bangunan dengan ciri khas kolonial menjadi alat representasi soal, Dimana arsitektur berperan dalam mempertegas stratifikasi sosial antara penduduk Eropa dan pribumi (Budiyono et al., 2012). Gaya arsitektur ini masih dapat ditemui di beberapa titik, meskipun banyak yang mengalami perubahan fungsi maupun bentuk.

Hal berbeda terjadi pada bangunan Societeit Concordia. Societeit Concordia dibangun sekitar tahun 1900 dengan fungsi awal sebagai tempat pertemuan para petinggi militer dan pemilik perkebunan (Schaik, 1996). Kemudian lambat laun gedung ini difungsikan memenuhi kebutuhan elit Eropa di Malang akan ruang sosial yang representatif. Hampir semua bangunan kolonial di Malang dibangun sekitar tahun 1920 an sejalan dengan perkembangan kotanya (Handinoto, 1996).

Purnawan Basundoro menjelaskan bahwa Gedung Societeit Concordia dibangun di sebelah utara alun-alun, tepat di persimpangan jalan (Colombijn & Cote, 2015). Gedung ini masih satu kawasan dengan bangunan lainnya, seperti Gereja Katolik yang dibangun tahun 1905 dan de Javanese Bank yang dibangun 1915 (Sulistyo, 2019). Gedung ini rutin digunakan untuk menggelar konser musik, pesta dansa, dan jamuan makan mewah di hari-hari tertentu seperti momen perayaan tahun baru (G. H. Budiman, 2017). Aktivitas ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan ruang sosial yang eksklusif bagi elit kolonial semakin meningkat. Tata letak gedung juga merepresentasikan kelas atas penggunaanya. Societeit Concordia terletak di sekitar alun-alun yang merupakan simbol gaya hidup dan hiburan masyarakat Eropa (Basundoro, 2009).

Seperti hiburan elit pada umumnya, Societeit Concordia dilengkapi dengan fasilitas memadai seperti ruang billiard, ruang kartu, perpustakaan, dan aula pertunjukan. Societeit Concordia yang terdapat di Hindia Belanda bersifat informal yang hanya dapat dikunjungi oleh warga Eropa dan sebagian kecil elit non-Eropa (Wiretno, 2019). Kehadiran golongan tersebut menunjukkan struktur kolonial yang eksklusif.

Tren gaya hidup Eropa di Kota Malang didorong munculnya beberapa aktivitas seperti konser musik dan pesta dansa (G. H. Budiman, 2017). Gedung ini bahkan mengundang Bandoengsche Kunstkring yang merupakan kelompok seni ternama saat itu. Pertunjukan balet internasional oleh Anna Pavlova juga pernah ditampilkan disini. Hal ini menunjukkan fungsi Societeit Concordia sebagai wadah penyebaran budaya elit. Pertunjukan sastra klasik, orkestra kecil, dan balet tidak hanya menjadi hiburan semata, namun juga menunjukkan simbol status kelas atas. Inilah yang membedakan Societeit Concordia dari tempat hiburan biasa.

Societeit Concordia juga berfungsi sebagai ruang rapat sosial dan politik; para perwira, pejabat, dan pengusaha perkebunan sering menggunakan gedung ini untuk pertemuan sosial (Nurgiansyah & Falah, 2017). Bangunan ini sangat menegaskan batas sosial bahwa hanya golongan kelas atas yang mendapatkan akses. Fungsi ini mencerminkan karakter ruang elit kolonial. Terdapat perbedaan kelas yang jelas disana. Golongan Eropa yang menghabiskan waktu luangnya di Societeit Concordia, menikmati dansa dengan iringan musik. Hal ini berbanding terbalik dengan Masyarakat pribumi di waktu yang sama menikmati seni ludruk yang ditampilkan di pojok alun-alun dan masih satu kawasan dengan Societeit Concordia (Basundoro, 2009).

Makanan dan minuman disajikan mengikuti budaya Belanda dan kolonial sehingga membentuk pola konsumsi aristokrat kolonial (Wiretno, 2019). Hidangan seperti *poffertjes*, *rijsttafel*, dan *brandy-soda* sering menjadi bagian dari pesta dansa maupun jamuan resmi. Hidangan ini membantu penyebaran gaya hidup Eropa di kalangan elit lokal.

Kegiatan yang dilakukan di Societeit Concordia menghasilkan kesinambungan finansial. Operasional gedung dan pembangunannya berasal dari biaya keanggotaan dan donasi. Hal ini menginterpretasikan bahwa ada jaringan ekonomi internal elit untuk mempertahankan ruang sosial mereka sendiri. Ruang sosial ini juga berfungsi sebagai instrument untuk menjaga kohesi sosial kalangan atas.

Memasuki decade 1930-an, Societeit Concordia mengalami pembaruan bentuk arsitektur dengan mengadopsi gaya Art Deco yang saat itu populer di Hindia Belanda. Perubahan ini mencerminkan keinginan pemerintah kolonial untuk menampilkan kesan modernitas dan kemajuan melalui estetika bangunan publik, tanpa mengubah fungsi sosialnya (Rondonuwu & Wahjutami, 2024). Art Deco dikenal dengan garis-garis tegas, ornament yang geometris, serta penggunaan material baru seperti beton bertulang yang berbeda dengan sebelumnya.

Meskipun terjadi perubahan bentuk arsitektur, fungsi gedung sebagai ruang eksklusif kaum kolonial tetap dipertahankan hingga kedatangan Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks urban kolonial, bentuk bangunan dapat berubah mengikuti mode dan teknologi,

### **Transformasi Fungsi pada Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi Tahun 1942-1949**

Pada 8 Maret 1942, ribuan tentara Jepang memasuki Kota Malang. Mereka berusaha menduduki pusat kota. Alun-alun yang menjadi tempat berkumpulnya para pribumi menjadi sasaran mereka. Tujuan mereka datang sebagai “saudara tua” mulai dilancarkan. Hal ini untuk membangun kedekatan dan kepercayaan terhadap rakyat pribumi (Basundoro, 2009). Jepang dengan cara yang halus mulai menguasai Kota Malang.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945 membawa perubahan besar terhadap fungsi-fungsi ruang kolonial, termasuk bangunan Societeit Concordia di Malang. Sebelum pendudukan, gedung ini berperan sebagai tempat pertemuan elit

Belanda, tetapi setelah Jepang mengambil alih, Gedung-gedung publik milik Belanda dialihfungsikan untuk kepentingan militer maupun administrasi pemerintahan. Societeit Concordia turut menjadi bagian dari bangunan yang digunakan sebagai pusat kendali kekuasaan Jepang di wilayah Malang dan sekitarnya (Dewi, 2020). Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dari tempat rekreasi elit kolonial menjadi bagian dari mesin kekuasaan negara pendudukan.

Pada proses transisi ini, Societeit Concordia tidak lagi menjadi tempat pertemuan eksklusif, melainkan menjadi ruangan yang digunakan untuk mendukung propaganda dan mobilisasi masyarakat. Pendudukan Jepang di kota-kota besar seperti Malang menandai proses reposisi ruang kolonial menjadi ruang birokratik dan militeristik. Penyesuaian terhadap nilai-nilai Jepang membuat banyak bangunan kolonial kehilangan makna semula, meskipun struktur fisiknya masih tetap dipertahankan.

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, bangunan Societeit Concordia berubah menjadi Gedung Rakyat, atau gedungnya rakyat Malang sebagai simbol bahwa Kota Malang sudah bebas dan merdeka dari penjajahan. Legitimasi akan gedung ini semakin menguat dengan dipilihnya Kota Malang dan Gedung Rakyat sebagai tempat dilaksanakannya sidang pertama dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sidang tersebut dilaksanakan pada 25 Februari – 5 Maret 1947. Tidak kurang dari 1500 orang hadir dan mendatangi gedung ini untuk sekedar melihat dan menjadi saksi atas perumusan jati diri rakyat yang sudah bebas dari belenggu penjajahan (Basundoro, 2009).

KNIP melakukan sidang mulai pukul 10.00 pagi. Pembahasan berfokus pada naskah Persetujuan Linggajati. Tokoh-tokoh seperti Moh. Hatta, Mr Assaat, dan Sutan Sjahrir juga hadir dalam sidang tersebut. Dalam sidang tersebut berakhir dengan diadakannya pemungutan suara atas dua mosi dari hasil perundingan. Mosi pertama dari Manai Sophian yang menghendaki daerah Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku dan Irian, segera diperjuangkan pemerintah untuk dapat bergabung dengan Indonesia. Mosi kedua dari Dr. Halim yang menyangkut naskah Persetujuan Linggajati. Hasil dari pemungutan suara, mosi Dr. Halim diterima dengan perbandingan 284 dan 2 suara (Muljana, 2008). Ini menunjukkan bahwa pengambilalihan ruang fisik juga menjadi bagian dari perjuangan ideologis dalam membangun legitimasi pemerintahan Indonesia.

Transformasi perubahan fungsi gedung ini tidak terlepas dari konteks sosial-politik saat itu, dimana Kota Malang menjadi salah satu basis penting pergerakan kemerdekaan di wilayah Jawa Timur. Ruang-ruang public seperti Societeit Concordia mengalami apropriasi makna melalui proses pengisian fungsi baru yang sesuai dengan semangat nasionalisme. Maka keberadaan gedung ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga sebagai ruang artikulasi kekuasaan dan identitas bangsa yang sedang dibentuk.

Selama periode 1945 hingga 1949, Kota Malang berada dalam situasi yang tidak stabil akibat konflik bersenjata antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Societeit Concordia menjadi saksi atas situasi revolusioner tersebut, di mana berbagai pertemuan, rapat, hingga diskusi penting berlangsung di sana (Dewi, 2020). Ruang ini menjadi bagian

dari ekosistem revolusi, mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan strategis di tingkat daerah.

Pada tahun 1947, Gedung Societeit Concordia dibakar sebagai strategi dalam perang gerilya melawan tentara Belanda yang ingin menduduki Kota Malang lagi. Gedung tersebut diratakan dengan tanah dan kemudian dibangun ulang dengan fungsi yang berbeda.

Meskipun arsitektur fisik bangunan tidak mengalami banyak perubahan, makna dan penggunaannya telah bergeser secara radikal. Banyak bangunan kolonial yang pascakemerdekaan tetap dipertahankan bentuknya namun mengalami transformasi simbolik karena pergantian fungsi dan aktor yang menggunakannya. Societeit Concordia menjadi salah satu contoh konkret dari fenomena tersebut di Malang (Rondonuwu & Wahjutami, 2024).

Transformasi gedung ini juga menunjukkan bagaimana ruang kolonial dapat direinterpretasi dalam konteks nasional tanpa harus dirombak secara struktural. Adaptasi fungsi ini merepresentasikan semangat bangsa yang berusaha membangun kedaulatan melalui pemanfaatan aset-aset kolonial yang sebelumnya menjadi simbol penindasan.

Dengan demikian, Societeit Concordia di Malang dalam kurun waktu 1945 hingga 1949 bukan hanya sekadar bangunan warisan kolonial, melainkan juga ruang kontestasi simbolik dan praktis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Perubahan fungsi gedung ini mencerminkan dinamika sosial-politik bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian sejarah perkotaan dalam memahami bagaimana ruang-ruang kolonial mengalami makna baru dalam konteks perjuangan nasional.

### **Keruntuhan Societeit Concordia Menjadi Mall Sarinah 1949-1970**

Pasca-kemerdekaan Indonesia, banyak bangunan peninggalan kolonial mengalami perubahan fungsi seiring perubahan sosial dan politik nasional. Di Kota Malang, Societeit Concordia yang dahulu menjadi pusat kegiatan sosial kaum elit Belanda meulai kehilangan fungsinya sebagai ruang eksklusif kolonial. Setelah

Setelah peristiwa Agresi Militer Belanda II dan peralihan kekuasaan pada akhir 1940-an, bangunan ini sempat mengalami kerusakan parah dan terbengkalai (Dewi, 2020). Namun, letaknya yang strategis di kawasan Kayutangan menjadikan area ini tetap potensial untuk dimanfaatkan ulang.

Pada awal tahun 1950-an, wacana pemanfaatan kembali bangunan bekas Societeit mulai mengemuka, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat kota. Dalam konteks pembangunan nasional, banyak ruang kolonial yang diarahkan menjadi ruang baru dengan fungsi ekonomi yang lebih inklusif. Pemanfaatan kembali gedung-gedung kolonial menjadi representasi dari keinginan negara untuk mengambil alih simbol kekuasaan lama dan mengartikulasikannya dalam bingkai pembangunan. Societeit Concordia menjadi bagian dari dinamika tersebut.

Kondisi fisik bangunan pada periode 1950–1960 masih menyisakan elemen-elemen khas arsitektur kolonial, meskipun sebagian besar interior dan struktur kayu



mengalami degradasi. Pemerintah Kota Malang bersama instansi pusat kemudian berupaya mengembangkan kawasan ini dengan pendekatan modern. Pada masa itu, pembangunan pusat perbelanjaan dianggap sebagai simbol kemajuan ekonomi rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan Orde Lama yang mulai menekankan pada modernisasi ruang kota (Rondonuwu & Wahjutami, 2024).

Akhirnya, pada pertengahan dekade 1960-an, dimulailah proses pembangunan pusat perbelanjaan baru di atas lahan bekas Societeit. Proyek ini didukung oleh BUMN dan Kementerian Perdagangan melalui program penyediaan pusat distribusi barang untuk masyarakat urban. Gedung tersebut kemudian diberi nama Sarinah, mengikuti semangat nasionalisme seperti halnya Sarinah di Jakarta yang diresmikan lebih dulu pada 1962. Pemilihan nama ini juga bermuatan simbolik, mengarah pada nilai kerakyatan dan kesetaraan sosial.

Transformasi Societeit Concordia menjadi Mall Sarinah tidak hanya menunjukkan perubahan fungsi, tetapi juga pergeseran orientasi ruang kota dari kolonial menjadi nasional. Arsitektur gedung Sarinah Malang awalnya mengadopsi gaya modern tropis dengan struktur beton bertingkat dua. Lantai pertama difungsikan sebagai supermarket dan area penjualan kebutuhan pokok, sementara lantai atas digunakan untuk restoran dan ruang pertemuan. Bangunan ini menjadi pelopor pusat perbelanjaan modern di Malang pada masa itu.

Keberadaan Mall Sarinah menjadi penanda pergeseran orientasi publik kota Malang dari ruang segregatif kolonial ke ruang ekonomi bersama. Dalam pandangan urban post-colonialism, perubahan ini merupakan strategi negara untuk menciptakan ruang-ruang baru yang tidak lagi bersifat eksklusif, namun terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa banyak kegiatan masyarakat mulai berpindah ke kawasan Sarinah, menjadikannya sebagai pusat baru interaksi sosial dan ekonomi.

Meski arsitektur fisik Societeit telah tergantikan oleh struktur bangunan baru, memori kolektif masyarakat tetap mengaitkan lokasi ini dengan jejak sejarah kolonial. Beberapa studi menunjukkan bahwa pergeseran fungsi ruang kolonial kerap diikuti oleh dilema antara pelestarian dan kebutuhan pragmatis pembangunan. Di Malang, pendekatan yang diambil adalah konservasi adaptif, yakni mempertahankan nilai historis kawasan melalui reinterpretasi fungsi. Mall Sarinah, meskipun modern, tetap menjadi bagian dari narasi sejarah kota.

Pembangunan Mall Sarinah juga merupakan dampak dari perkembangan lingkungan sosial ekonomis. Hal ini karena Kota Malang semakin maju menjadi kota modern. Semakin banyak pengusaha yang tertarik untuk andil dalam pembangunan sosial ekonomi kota. Kawasan yang strategis juga mendukung Mall Sarinah tumbuh seperti pusat perbelanjaan di kota-kota besar lainnya (Putri, 2021).

Penggunaan gedung ini sebagai pusat aktivitas ekonomi sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan kota-kota menengah. Sarinah juga menjadi ikon perkembangan ekonomi lokal yang membuka peluang kerja baru serta menghidupkan sektor informal di sekitarnya. Selain itu, transformasi ini turut

memperkuat koridor Kayutangan sebagai kawasan vital ekonomi dan budaya (Rondonuwu & Wahjutami, 2024). Fungsi baru ini memperpanjang peran historis gedung sebagai ruang interaksi dan pertukaran.

Pada awal 1960-an, kehidupan masyarakat di sekitar kawasan ini masih sangat kental dengan corak ekonomi tradisional. Pasar-pasar rakyat dan toko kelontong menjadi pusat distribusi barang kebutuhan sehari-hari. Namun, menjelang dekade 1970-an, wajah kawasan ini mulai berubah seiring dengan pembangunan Mall Sarinah oleh pemerintah Orde Baru yang kala itu sedang giat memodernisasi kota-kota besar di Indonesia. Sarinah didirikan bukan hanya sebagai tempat belanja, tetapi juga sebagai simbol modernitas dan stabilitas ekonomi di tengah upaya pemerintah membangun citra Indonesia baru pasca-konflik politik tahun 1965. Dalam konteks ini, Gedung Sarinah menjadi semacam “etalase pembangunan” yang menunjukkan kemajuan tata kota dan sistem ekonomi nasional.

Kehadiran Mall Sarinah memberi dampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Masyarakat kelas menengah ke atas mulai menjadikan Sarinah sebagai tempat belanja pilihan yang berbeda dengan pasar tradisional. Gaya hidup konsumtif mulai diperkenalkan melalui toko-toko modern yang menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga, pakaian impor, dan produk industri nasional. Sementara itu, masyarakat kelas bawah yang tinggal di sekitar kawasan Kayutangan, Oro-Oro Dowo, dan Klojen masih menjadikan Sarinah sebagai tempat “cuci mata”, atau sekadar berjalan-jalan menikmati suasana kota. Hal ini menunjukkan bahwa Sarinah memiliki daya tarik sebagai ruang sosial baru bagi warga kota, meskipun belum semua kelompok sosial dapat menjangkaunya secara ekonomi (Wibowo, 2021).

Interaksi antara sektor formal di dalam mall dan sektor informal di luar gedung juga menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Malang saat itu. Banyak pedagang kaki lima, penjual makanan, dan tukang becak yang menggantungkan penghidupan mereka dari arus pengunjung Sarinah. Kawasan luar gedung pun tumbuh menjadi ruang ekonomi tersendiri yang hidup berdampingan dengan modernitas di dalam mall. Dengan demikian, Sarinah dan lingkungannya menjadi arena bagi tumbuhnya model ekonomi ganda yang khas pada masa Orde Baru, yakni modernisasi yang tidak sepenuhnya menghapus bentuk-bentuk ekonomi tradisional.

Dalam aspek budaya, Sarinah juga menjadi simbol pergeseran orientasi masyarakat urban. Remaja dan pelajar mulai menjadikan kawasan ini sebagai tempat berkumpul dan mencari hiburan. Bioskop di sekitar Kayutangan dan kegiatan seni yang kadang digelar di pelataran gedung menjadikan Sarinah bagian dari transformasi budaya masyarakat kota. Kehidupan malam di kawasan ini pun mulai tumbuh, ditandai dengan munculnya warung-warung kopi dan tempat jajan yang buka hingga larut malam. Aktivitas ini menjadi penanda bahwa masyarakat Malang mulai mengalami pergeseran dalam pola konsumsi waktu dan ruang, dari kegiatan yang berpusat di rumah dan pasar tradisional menuju ruang publik perkotaan yang lebih cair dan inklusif.

Dengan demikian, kehidupan masyarakat Malang di sekitar Mall Sarinah pada tahun 1960–1980-an mencerminkan dinamika peralihan dari tatanan tradisional ke arah

masyarakat urban modern. Mall Sarinah bukan sekadar bangunan perbelanjaan, tetapi juga simbol transisi sosial, ekonomi, dan budaya yang mencerminkan perubahan besar dalam sejarah kota. Ia menjadi ruang yang memadukan simbolisme nasional, praktik ekonomi harian, dan dinamika kebudayaan lokal yang terus berkembang.

Dalam dua dekade berikutnya, Mall Sarinah mengalami beberapa renovasi dan perluasan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Meski renovasi menghilangkan sebagian besar elemen arsitektur asli, gedung ini tetap dipertahankan sebagai salah satu ikon komersial Kota Malang. Perubahan bentuk fisik dianggap sebagai konsekuensi dari dinamika sosial yang terus berkembang. Namun demikian, penting dicatat bahwa ruang ini masih memiliki lapisan sejarah yang kuat, baik dalam aspek memori maupun jejak sosial.

Pemerintah daerah Malang bersama pegiat sejarah dan arsitektur telah menggagas revitalisasi kawasan ini sejak tahun 2018, dengan mengusulkan integrasi unsur-unsur historis ke dalam desain fasad dan tata ruang interior Mall Sarinah. Upaya ini bertujuan membangkitkan kembali kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah yang melekat pada bangunan tersebut. Inisiatif ini sejalan dengan pendekatan pelestarian berbasis komunitas yang menekankan pentingnya partisipasi lokal dalam proses konservasi.

Kawasan Kayutangan secara keseluruhan mulai dikembangkan sebagai koridor heritage kota, yang mencakup bangunan-bangunan bersejarah termasuk lokasi bekas Societeit. Dengan penataan ulang dan pelabelan ruang publik, masyarakat diajak untuk memahami sejarah kota melalui pengalaman ruang sehari-hari. Transformasi Societeit Concordia menjadi Mall Sarinah dengan demikian dapat dibaca sebagai bagian dari narasi panjang kota yang terus bergerak dan beradaptasi dengan zamannya.

Mall Sarinah bukan hanya pusat perbelanjaan, melainkan juga ruang yang memuat warisan sejarah, ekonomi, dan budaya masyarakat Malang. Perjalanan panjang bangunan ini mencerminkan dinamika sosial Indonesia dari masa kolonial, kemerdekaan, hingga modernisasi. Dengan menjadikan Mall Sarinah sebagai bagian dari lanskap historis yang hidup, Kota Malang memperlihatkan kemampuannya dalam menjalin masa lalu dan masa depan melalui arsitektur dan tata ruang.

### **Kesimpulan (*Conclusion*)**

Transformasi Gedung Societeit Concordia di Malang sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1970 mencerminkan dinamika sosial-politik dan ekonomi yang kompleks dalam sejarah Indonesia modern. Pada masa kolonial Belanda, gedung ini berfungsi sebagai pusat pergaulan elite Eropa, mencerminkan segregasi sosial berbasis ras dan status. Namun, setelah kemerdekaan, fungsinya bergeser menjadi ruang sidang KNIP Daerah Malang pada masa revolusi, yang menandai perubahan simbol kekuasaan dari kolonial ke republik. Fungsi baru ini menunjukkan adanya apropriasi ruang kolonial untuk agenda nasional dan perjuangan politik lokal.

Pasca-1949, perubahan orientasi pembangunan nasional mengarah pada pemanfaatan ruang-ruang kolonial menjadi fasilitas publik yang bersifat ekonomis. Proses ini berlangsung melalui strategi konservasi adaptif, yaitu mempertahankan nilai

historis sambil mengubah fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat urban. Pada dekade 1960-an, kawasan ini dikembangkan menjadi Mall Sarinah yang mencerminkan visi ekonomi kerakyatan dan modernisasi ruang kota. Sarinah sebagai institusi ekonomi negara memperkuat narasi nasionalisme dan pemutusan dari jejak kolonial lama, meski secara spasial masih menggunakan tapak sejarah Societeit.

Dengan demikian, perubahan dari gedung KNIP menjadi Mall Sarinah bukanlah bentuk penghilangan sejarah, melainkan transformasi makna ruang yang terus berkembang. Gedung ini menjadi saksi perubahan zaman dari kolonialisme, revolusi kemerdekaan, hingga modernisasi era pembangunan. Maka, keberlanjutan memori dan fungsi ruang seperti Societeit Concordia menjadi penting dalam kajian sejarah perkotaan, khususnya dalam konteks pelestarian identitas kota. Integrasi antara nilai sejarah dan fungsi modern akan terus menjadi tantangan dalam penataan kota yang berakar pada warisan kolonial.

### **Daftar Pustaka (Reference)**

- Basundoro, P. (2009). *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang Sejak Kolonial Sampai Kemerdekaan* (M. Budiman, Ed.). Penerbit Ombak.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Penerbit Ombak.
- Budiman, G. H. (2017). Modernisasi dan Terbentuknya Gaya Hidup Elit Eropa di Bragaweg (1894-1949). *Jurnal Patanjala*, 9(2).
- Budiyono, D., Nuelaelih, E. E., & Djoko, R. (2012). Lanskap Kota Malang Sebagai Obyek Wisata Sejarah Kolonial. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 4(1), 43.
- Choirunnisak, & Afiyanto, H. (2022). Gemeente Malang: Keruangan, Segregasi, dan Potensi Wilayah 1914-1940. *Jurnal Historia Madania*, 6(1), 147–167.
- Dewi, R. K. (2020). Pemanfaatan Gedung Societeit Concordia sebagai Ruang Sidang KNIP Daerah Malang Tahun 1947–1950. *Jurnal Pendidikan Sejarah AVATARA*, 8(1).
- Handinoto. (1996). Perkembangan Kota Malang Pada Jaman Kolonial: 1914-1940. *DIMENSI*.
- Handinoto, & Sochargo, P. H. (1996). *Perkembangan Kota & Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. UK Petra.
- Hosniyah. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang 1900-1935. *Journal AVATARA*, 4(3).
- Colombijn, F., & Cote, J. (2015). *Cars, Conduits, and Kampongs: The Modernization of the Indonesian City, 1920-1960*. BRILL.
- Makkelo, I. D. (2017). Sejarah Perkotaan: Sebuah Tinjauan Historiografis dan Tematis. *Lensa Budaya: Journal of Cultural Sciences*, 12(2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jlb>
- Muljana, S. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid 2*. LKiS Yogyakarta.
- Nurgiansyah, N. F., & Falah, M. (2017). Gedung Merdeka Sebagai Objek Wisata di Kota Bandung. *Jurnal Patanjala*, 9(1).
- Putri, R. C. A. (2021). Konsep The New Urban History dalam Studi Kasus Perubahan Monumen KNIP ke Monumen Sarinah di Kota Malang. *CHRONOLOGIA*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.22236/jhe.v3i1.6392>

- Rondonuwu, Y. M., & Wahjutami, E. L. (2024). Pengaruh Citra Kota Malang sebagai Kota Kolonial melalui Metode Serial Vision. *ATRIUM: Jurnal Arsitektur*, 10(1), 87–100. <https://doi.org/10.21460/atrium.v10i1.235>
- Saffanah, W. M. (2018). Industrialisasi Dan Berkembangnya Kota Malang Pada Awal Abad Ke-20. *Jurnal Agastya*, 8(2).
- Schaik, V. A. (1996). *Malang: Beeld Van Een Stad*. Asia Major.
- Sulistyo, W. D. (2019). Learning Activities From Learning Resource: Pemanfaatan dan Pemaknaan Situs Sejarah Kawasan Alun-Alun Merdeka Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 2(1).
- Wibowo, G. (2021). Revitalisasi Kawasan Perdagangan di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang. *Jurnal Planesa*, 3(2).
- Wiretno. (2019). Aktivitas Peleisir Orang-Orang Eropa di Surabaya Masa Kolonial (Abad 20). *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 13(1). <https://doi.org/10.17977/um020v13i12019p12>
- Yuliati. (2012). Sistem Pemerintahan Wilayah Malang Pada Masa Kolonial. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.